

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian desa merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan daerah, dan sering kali keberadaannya kurang mendapatkan perhatian. Salah satu elemen kunci yang dapat mendorong kemajuan ekonomi desa adalah dengan adanya unit usaha (Gobal *et al.*, 2024). Unit usaha ini bisa berbentuk beragam, mulai dari pertanian yang mengandalkan hasil bumi, kerajinan tangan yang menampilkan kreativitas masyarakat, perdagangan keperluan pertanian, hingga perdagangan yang menghubungkan produk lokal dengan pasar yang lebih luas. Kehadiran unit usaha memberikan masyarakat desa kesempatan untuk memperoleh pendapatan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain itu, unit usaha juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja, sehingga membantu mengurangi angka pengangguran di desa (Dewi *et al.*, 2023).

Menurut Sinarwati (2019) kemajuan serta perkembangan unit usaha di desa sangat tergantung pada penerapan akuntansi atau pencatatan keuangan yang baik. Ketika para pengusaha mencatat pemasukan dan pengeluaran mereka dengan teratur, mereka bisa mendapatkan gambaran yang jelas tentang kinerja usaha mereka. Dengan data ini, mereka dapat menganalisis keuntungan dan menemukan area yang perlu diperbaiki. Ini bukan hanya bermanfaat bagi pengusaha, tetapi juga memberikan informasi berharga bagi calon investor yang mungkin tertarik untuk berinvestasi di desa. Data keuangan yang akurat dapat meningkatkan kepercayaan dan menarik lebih banyak dukungan untuk pengembangan usaha (Sambodo *et al.*, 2023).

Menurut Masdiantini *et al.*, (2022) data keuangan sebuah unit usaha yang baik seharusnya menampilkan laporan keuangan yang lengkap. Laporan keuangan memiliki peran penting dalam perkembangan suatu entitas. Dengan laporan keuangan, pemilik usaha bisa mendapatkan data dan informasi yang terstruktur mengenai usaha mereka, yang membantu dalam pengambilan keputusan.

Banyak entitas kecil dan menengah di Indonesia yang belum menerapkan tata kelola keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) karena berbagai alasan. Selain kurangnya pengetahuan tentang akuntansi, banyak pemilik usaha juga tidak terbiasa menggunakan akuntansi dalam pengelolaan keuangan mereka (Sinarwati *et al.*, 2024). Laporan keuangan yang seharusnya dibuat oleh unit usaha juga harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, dalam hal ini Pemerintah dengan Ikatan Akuntansi Indonesia mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) sebagai acuan untuk pencatatan laporan keuangan sebuah entitas yang setara dengan UMKM.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) menetapkan bahwa laporan keuangan yang harus dibuat mencakup laporan Laba Rugi, Laporan Posisi Keuangan, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (IAI, 2018). Laporan Posisi Keuangan atau Neraca, memuat informasi mengenai komponen aset, liabilitas, dan ekuitas. Sementara itu, Laporan Laba Rugi menggambarkan kinerja keuangan usaha selama periode tertentu. Kebijakan akuntansi yang digunakan dirangkum dalam catatan atas laporan keuangan.

Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) adalah lembaga usaha yang didirikan oleh desa adat untuk mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi desa adat, baik secara langsung maupun melalui unit-unit usaha. BUPDA dibentuk

sebagai upaya dalam meningkatkan dan mengembangkan perekonomian kerakyatan yang berbasis nilai-nilai adat di Bali, Pemerintah provinsi Bali melalui Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) bersama-sama dengan Majelis Desa Adat (MDA) melaksanakan pembentukan BUPDA ((MDA), 2021). Pembentukan BUPDA pada setiap Desa Adat di Bali sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Bali (Suadnyana, 2020).

Dalam merealisasikan tujuan dari pembentukan BUPDA tersebut, salah satu Desa Adat di Bali yang telah membentuk BUPDA sejak tahun 2023 yaitu Desa Bonyoh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali, yang merupakan tempat dilakukannya penelitian ini. Desa Adat Bonyoh merupakan desa yang terletak di Timur Pulau Bali merupakan desa yang berada di kawasan perbukitan tepatnya di bawah kaldera Gunung Batur dan dekat Danau Batur. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dengan letaknya yang berada di area dataran tinggi membuat Desa Bonyoh sangat cocok untuk kegiatan pertanian.

Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) Surya Tani Desa Bonyoh adalah badan usaha yang terletak di Desa Bonyoh Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. BUPDA Surya Tani merupakan badan usaha milik desa adat yang menjual keperluan pertanian seperti obat-obat serta pupuk jeruk dan sayur, peralatan pertanian, pakan ternak dan masih banyak lagi. Keberadaan BUPDA Surya Tani ini sangat membantu dalam hal masalah pertanian, dapat dilihat dari awal berdiri hingga saat ini perkembangan BUPDA sangat baik. Dari saat awal berdiri hanya menjual obat-obat jeruk hingga saat ini sudah menjual berbagai jenis obat-obat jeruk dan sayur, berbagai pupuk, alat-alat pertanian, pakan ternak dan masih banyak kebutuhan pertanian lainnya.

Meskipun BUPDA Surya Tani tergolong baru dibentuk sejak tahun 2023, usaha ini telah menunjukkan perkembangan usaha yang cukup signifikan dalam waktu yang relatif singkat. Berdasarkan hasil observasi awal, BUPDA Surya Tani telah menjalankan aktivitas usaha secara aktif dengan volume transaksi yang aktif dan konsisten. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa secara ekonomi BUPDA Surya Tani memiliki peran strategis dalam mendukung kemandirian keuangan desa adat. Perkembangan BUPDA Surya Tani bisa dilihat dari jumlah omset penjualan yang tetap berjalan serta mengalami kenaikan dan penurunan jumlah omset perbulannya. Berikut tabel jumlah omset BUPDA Surya Tani:

Tabel 1 1 Data Omset Penjualan Bulanan BUPDA Surya Tani

NO	PERIODE	Jumlah Omset Penjualan Tahun 2023	Jumlah Omset Penjualan Tahun 2024	Jumlah Omset Penjualan Tahun 2025
1.	Januari		Rp129.507.000	Rp131.910.000
2.	Februari		Rp118.000.000	Rp129.673.000
3.	Maret		Rp123.133.000	Rp136.782.000
4.	April		Rp149.822.000	Rp129.868.000
5.	Mei		Rp152.890.000	Rp171.641.000
6.	Juni	Rp115.218.000	Rp182.676.000	Rp160.510.000
7.	Juli	Rp101.524.000	Rp167.358.000	Rp161.055.000
8.	Agustus	Rp121.714.000	Rp139.854.000	Rp123.535.000
9.	September	Rp181.378.000	Rp108.956.000	Rp142.819.000
10.	Oktober	Rp141.568.000	Rp143.164.000	Rp128.709.000
11.	November	Rp130.365.000	Rp128.837.000	Rp107.316.000
12.	Desember	Rp135.503.000	Rp123.305.000	Rp179.297.000

(Sumber: Data Perusahaan BUPDA Surya Tani Tahun 2023, 2024 dan 2025))

Dilihat dari tabel diatas BUPDA Surya Tani memiliki omset penjualan yang cukup besar dan tergolong ke dalam UMKM Usaha Kecil. Selain menunjukkan perkembangan usaha yang baik, BUPDA Surya Tani juga memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan beberapa BUPDA lainnya di Bali. Sebagian besar BUPDA di Bali mengembangkan usaha berbasis pariwisata, jasa, perdagangan

tradisional, maupun pengelolaan aset desa adat. Untuk melihat perbedaan karakter tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 2 Perbandingan data BUPDA

No	Nama dan Lokasi BUPDA	Bidang Usaha Utama	Karakteristik
1.	BUPDA Inataran (Sanur, Denpasar)	Pasar adat, parkir, wisata, event management, shuttle bus listrik.	Berbasis jasa dan pengelolaan aset desa.
2.	BUPDA Canggu (Badung)	Pengelolaan potensi ekonomi desa adat, layanan publik dan usaha berbasis kawasan wisata.	Berbasis pariwisata dan jasa.
3.	BUPDA Watu Hyang (Batuyang, Gianyar)	Peken umum, peken senggol, bongkar muat material, sarana upacara.	Berbasis perdagangan tradisional dan kebutuhan adat.
4.	BUPDA Desa Adat Tigawasa (Buleleng)	Pengembangan ekonomi berbasis kerajinan bambu.	Berbasis industri kreatif dan pemberdayaan masyarakat adat.
5.	BUPDA Desa Adat Penglipuran (Bangli)	Pengembangan potensi ekonomi desa wisata adat.	Berbasis desa adat dan pengelolaan potensi lokal.

6.	BUPDA Surya Tani (Kintamani, Bangli)	Obat pertanian, pupuk, pakan ternak, sarana produksi pertanian.	Berbasis sektor pertanian dengan aktivitas persediaan barang dagang yang tinggi.
----	---	---	--

(Sumber: Data Diolah Peneliti)

Tabel menunjukkan bahwa sebagian besar BUPDA di Bali beroperasi di sektor jasa, pariwisata, perdagangan tradisional, dan pengelolaan aset tradisional. Sementara itu, BUPDA Surya Tani memiliki karakteristik yang berbeda, beroperasi di sektor perdagangan sarana produksi pertanian berupa obat pertanian, pupuk, pakan ternak dan kebutuhan pertanian lainnya yang secara langsung mendukung mata pencaharian mayoritas masyarakat desa Adat Bonyoh sebagai petani.

Selain karakteristik usahanya yang berbeda, BUPDA Surya Tani juga menghadapi fenomena akuntansi yang menarik untuk diteliti. Sebagai pebisnis perdagangan dengan aktivitas jual beli yang teratur, manajemen persediaan merupakan aspek penting dalam penyusunan laporan keuangan. Namun, berdasarkan pengamatan awal, BUPDA Surya Tani belum memiliki persediaan fisik dan catatan persediaan yang sistematis, sehingga mengakibatkan informasi yang tidak akurat nilai persediaan dan harga pokok penjualan. Padahal, sebagai usaha dagang informasi terkait persediaan menjadi komponen penting dalam penyusunan laporan keuangan (Mayarani *et al.*, 2025).

Namun, dalam operasionalnya masih banyak sistem-sistem yang belum diaplikasikan. Salah satu sistem yang dimaksud adalah sistem pencatatan dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM yang nantinya sebagai

bahan pertanggungjawaban BUPDA Surya Tani kepada panureksa BUPDA dan prajuru Desa Adat sebagai atasan dari badan usaha ini. Sementara ini pencatatan yang dilakukan oleh BUPDA Surya Tani hanya mencatat penerimaan dan pengeluaran kas, pencatatan harga beli barang, dan laporan keuangan Laba Rugi yang dibuat secara sederhana.

Menurut Risal *et al.* (2024) penyusunan laporan keuangan merupakan suatu keharusan bagi setiap entitas, termasuk *Baga Usaha Padruwen Desa Adat* (BUPDA). Berdasarkan SAK EMKM, laporan keuangan yang wajib disusun oleh entitas UMKM mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, serta catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan berfungsi representasi penting dalam menilai posisi dan kinerja keuangan suatu entitas (Aksan *et al.*, 2019). Sebagai penyajian terstruktur, laporan ini memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas, yang berguna bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Demikian halnya dalam penyusunan laporan keuangan BUPDA, pengelola BUPDA diwajibkan untuk mendokumentasikan setiap aktivitas usaha yang telah dilaksanakan dan mencatatnya dalam laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan akan berfungsi sebagai dasar bagi pengelola BUPDA dalam mengambil keputusan terkait ekonomi (Christianingrum *et al.*, 2021).

Menurut Majelis Desa Adat Provinsi Bali (2021) Struktur Bhaga Usaha Padruwen Desa Adat biasanya terdiri dari Prajuru Desa Adat, Panureksa BUPDA dan Manggala BUPDA. Adapun kewajiban pelaksana operasional secara umum adalah melaksanakan kegiatan operasional BUPDA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Selain itu BUPDA wajib menerapkan prinsip-

prinsip *kawigunan, padumpada, menyama braya, gilik saguluk, parasparo, salunglung sabayantaka, sareng-sareng, pangunadikaan dan melanting*. BUPDA memiliki kewajiban menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada prajuru Desa Adat mengenai kondisi dan perkembangan BUPDA, yang mencakup hasil usaha serta laporan perubahan kekayaan BUPDA.

Pengurus *Baga Usaha Padruwen Desa Adat* (BUPDA) dalam melaksanakan kegiatan pencatatan keuangan cenderung menggunakan metode yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Hal itu biasanya disebabkan oleh banyak faktor salah satunya adalah kurangnya pemahaman pengurus terkait Standar Akuntansi yang sesuai dan faktor lainnya (Atmadja *et al.*, 2021). Akibatnya, laporan keuangan yang disajikan belum optimal dan tidak memenuhi Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan. Hal ini berpotensi mengakibatkan kurangnya ketelitian dalam pelaporan, yang dapat menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat terhadap pengelolaan BUPDA tersebut.

Penyusunan laporan keuangan BUPDA Surya Tani masih belum sesuai berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Laporan posisi keuangan belum dibuat, Laba Rugi yang dibuat belum sesuai standar dan belum dibuatnya catatan atas laporan keuangan, keterangan tersebut didapat dari hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti dan wawancara dengan karyawan BUPDA Surya Tani.

Berikut jawaban dari informan atas pertanyaan yang diberikan peneliti:

“Pencatatan pemasukan dan pengeluaran kas masih dilakukan secara manual dengan cara ditulis.”

“jadi pada saat melakukan pencatatan biasanya saya melihat dari kwitansi, nota, bukti transfer ataupun bukti lainnya yang berkaitan dengan seperti pengeluaran atau pembelian barang-barang yang dibutuhkan.”

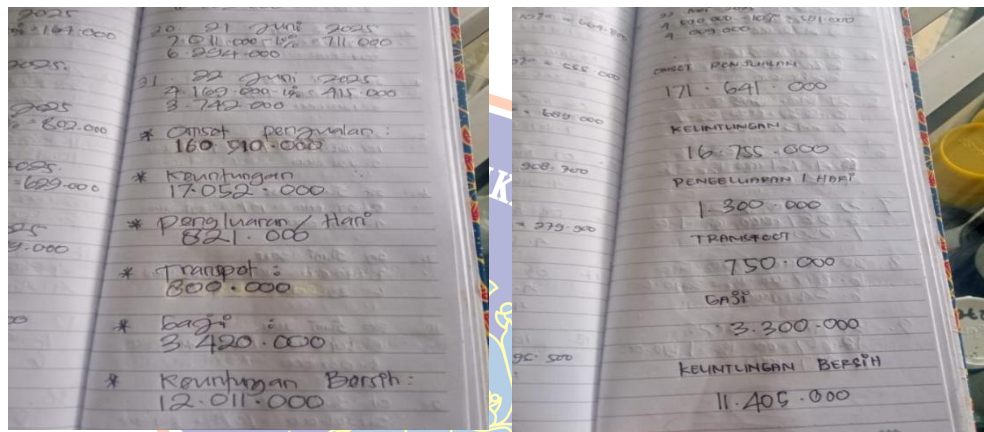
“untuk standar akuntansi keuangan disini belum menggunakan standar akuntansi apapun, karena laporan keuangan yang kami buat hanya berupa

laporan keuangan yang sangat sederhana, namun pelaporannya kami catat dengan benar.”

“bagaimana ya saya menjelaskan, saya juga tidak terlalu mengerti bagaimana penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi itu dan saya juga tidak paham tentang Standar Akuntansi Keuangan.

“saya sendiri yang melakukan penyusunan laporan keuangan, memantau stok barang dan melayani pembeli.

Berikut ini merupakan dokumentasi bukti bahwa BUPDA Surya Tani masih menggunakan pencatatan secara manual serta pembuatan laporan yang masih sangat sederhana:



Gambar 1 1 Dokumentasi Pencatatan Manual

Gambar 1 2 Dokumentasi Pencatatan Manual

Berdasarkan informasi informan yaitu pegawai BUPDA Surya Tani yang peneliti wawancara saat observasi awal mencerminkan bahwa pencatatan yang dilakukan oleh BUPDA Surya Tani masih sangat sederhana, terlihat dari pencatatan yang masih ditulis dan belum menggunakan perangkat yang mendukung. Meskipun pencatatan ini dilakukan dengan cermat, metode manual seperti tersebut memiliki jumlah keterbatasan terutama terkait efisiensi dan akurasi. Selain itu, dalam penyusunan laporan keuangan pencatatan transaksi belum mencakup pengakuan dan pengukuran aset tetap secara sistematis, belum dilakukan pencatatan

penyusutan serta tidak adanya pencatatan khusus terkait pencatatan stok fisik dan persediaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tahap penyusunan laporan keuangan belum sepenuhnya mengacu pada prinsip-prinsip dalam SAK EMKM.

Penyusunan laporan keuangan dilakukan sendiri oleh karyawan BUPDA Surya Tani yang juga bertanggung jawab untuk memantau stok barang dan melayani pelanggan. Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya pemisahan fungsi dalam sistem pengendalian internal. Pemisahan fungsi merupakan salah satu prinsip dasar dalam pengendalian internal yang bertujuan untuk meminimalkan risiko kesalahan pencatatan maupun potensi penyalahgunaan aset (N. W. Y. Dewi *et al.*, 2020). Meskipun SAK EMKM tidak secara eksplisit mengatur sistem pengendalian internal, standar tersebut menekankan pentingnya penyajian laporan keuangan yang andal dan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.

Dengan jumlah omset BUPDA Surya Tani per bulan mencapai >100 juta, belum adanya pencatatan khusus terkait stok fisik dan persediaan yang sistematis dan tidak disusunnya laporan keuangan yang sesuai SAK EMKM mengakibatkan laporan keuangan yang dihasilkan belum mencerminkan posisi keuangan dan kinerja usaha yang sesungguhnya ketidaksesuaian tersebut menciptakan ketidakpastian dan memperlemah transparansi pada BUPDA Surya Tani. Hal ini mengaburkan informasi keuangan yang krusial bagi para *Manggala* BUPDA dan juga Masyarakat desa.

Untuk memperjelas bentuk ketidaksesuaian antara praktik penyusunan laporan keuangan BUPDA Surya Tani dengan ketentuan SAK EMKM, berikut disajikan hasil identifikasi awal berdasarkan dokumentasi laporan keuangan yang telah disusun.

Tabel 1 3 Perbandingan Awal Praktik Penyusunan Laporan Keuangan BUPDA Surya Tani dengan SAK EMKM

No	Komponen/ Ketentuan SAK EMKM	Praktik di BUPDA Surya Tani	Kesesuaian Awal	Indikasi Permasalahan
1	Laporan Posisi Keuangan (Aset, Liabilitas, Ekuitas)	Menyajikan daftar kas dan beberapa aset, belum memisahkan secara sistematis antara aset, kewajiban, dan ekuitas.	Belum sepenuhnya sesuai	Struktur laporan mengikuti format standar
2	Laporan Laba Rugi	Menyajikan pendapatan dan biaya operasional	Sebagian sesuai	Belum mencantumkan beban penyusutan aset tetap
3	Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)	Belum disusun	Tidak sesuai	Tidak ada penjelasan kebijakan akuntansi dan rincian akun
4	Pengakuan Penyusutan Aset Tetap	Belum dilakukan	Tida sesuai	Laba belum mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya
5	Pemisahan Modal dan Laba Ditahan	Belum dipisahkan secara jelas	Belum sesuai	Struktur ekuitas belum sistematis
6	Dasar Pengukuran (Biaya Historis)	Menggunakan pencatatan berbasis kas	Sebagian sesuai	Belum sepenuhnya berbasis pengakuan accrual sederhana sesuai EMKM

(Sumber: Data Diolah Peneliti)

Berdasarkan perbandingan awal tersebut, terlihat bahwa laporan keuangan yang disusun belum sepenuhnya memenuhi komponen dan prinsip pengakuan sebagaimana diatur dalam SAK EMKM. Ketidaksesuain tersebut terutama terlihat

pada belum diakuinya beban penyusutan, belum disusunnya catatan atas laporan keuangan, serta belum terstrukturnya laporan posisi keuangan secara sistematis. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik dan standar yang berlaku, sehingga diperlukan analisis mendalam serta ketidaksesuaian tersebut tidak cukup hanya diidentifikasi, tetapi perlu dilakukan rekonstruksi laporan keuangan berbasis SAK EMKM agar dapat memberikan gambaran posisi keuangan dan kinerja yang sesungguhnya.

Permasalahan penyusunan dan pelaporan keuangan merupakan salah satu faktor yang membuat usaha gagal. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor salah satunya yakni kurangnya kesadaran dari para pemangku kepentingan ekonomi terkait pelaporan keuangan yang akurat (Lukason & Camacho-Miñano, 2021). Laporan keuangan yang disusun dan dilaporkan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dapat menyebabkan pengambilan keputusan dalam usaha yang salah. Berdasarkan hal tersebut penyusunan laporan keuangan yang standar dengan SAK EMKM menjadi solusi paling tepat dalam hal penyusunan laporan keuangan sebuah usaha seperti BUPDA Surya Tani, dimana tujuan dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi terkait posisi keuangan, laba rugi dan catatan atas laporan keuangan yang dapat membantu pemilik usaha dalam pengambilan keputusan.

Namun, berdasarkan hasil wawancara dan observasi awal yang telah dilakukan BUPDA Surya Tani belum menyusun laporan keuangan sesuai SAK EMKM. Sedangkan, penyelesaian permasalahan penyusunan dan pelaporan keuangan pada suatu usaha adalah dengan menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAK

EMKM. Dengan menyusun laporan keuangan yang baik dan benar sebenarnya memberikan dampak yang signifikan dalam kemajuan suatu usaha.

Menurut Miftahudin & Sisdanto (2024) menyatakan laporan keuangan yang baik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga masyarakat desa dapat memahami kondisi keuangan badan usaha. Analisis laporan keuangan membantu pengelola badan usaha dalam mengambil keputusan yang tepat, baik dalam pengelolaan aset maupun perencanaan keuangan dan juga mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam operasionalnya, sehingga dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Kualitas laporan keuangan merupakan hal penting bagi perusahaan untuk menunjukkan kinerjanya selama periode tertentu dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan perusahaan (Herawati *et al.*, 2020). Dengan Mengacu pada teori Stakeholder, pentingnya transparansi dan akuntabilitas di BUPDA dapat dijustifikasi, dimana kepercayaan Masyarakat terhadap pengelolaan keuangan akan berpengaruh pada keberlanjutan unit usaha (Adiputra, 2019).

Penelitian ini didukung oleh penelitian Ristie & Marlina (2023) yang menunjukkan bahwa pencatatan laporan keuangan Toko Eloris Tani masih melakukan secara sederhana dan manual (*Cash Basis*) dimana terdiri dari kas pengeluaran dan kas pemasukan saja.

Penelitian Putra & Werastuti (2022) menunjukkan bahwa pencatatan yang dilakukan oleh BUPDA Teja Rahayu hanya mencatat penerimaan dan pengeluaran kas yang menyebabkan beberapa pertanyaan dari pimpinan BUPDA Teja Rahayu akan catatan keuangan yang masih rancu. Dengan hasil tersebut dinyatakan bahwa laporan keuangan yang dimiliki oleh BUPDA Teja Rahayu tidak sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku.

Berdasarkan penelitian Langi *et al.*, (2025) menunjukkan bahwa Apotek Manggala Jaya telah membuat laporan keuangannya berupa Laporan Laba Rugi pada setiap periode. Namun laporan keuangan yang dibuat belum sesuai dengan SAK EMKM. Apotek Manggala Jaya hanya membuat catatan sederhana yang mencatat transaksi pengeluaran dan pemasukan kas.

Menurut penelitian Dewi *et al.*, (2020) dan Aristo *et al.*, (2024) juga menunjukkan bahwa penyusunan laporan yang dilakukan masih sangat sederhana hanya berupa buku kas dan belum sesuai dengan SAK EMKM. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman pengurus BUMDes terkait dengan SAK EMKM.

Penelitian lain dari Abdullah *et al.*, (2024) menunjukkan bahwa laporan keuangan BUMDes Gemilang Molowahu belum sepenuhnya menerapkan SAK EMKM, hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa komponen yang belum disajikan yakni catatan akhir laporan keuangan, sehingga laporan keuangannya belum lengkap dan tidak mematuhi SAK EMKM.

Berdasarkan penelitian terdahulu adapun keterbatasan dari penelitian sebelumnya yang umumnya meneliti penerapan SAK EMKM pada UMKM atau BUMDes secara umum, belum banyak yang mengkaji kesesuaian praktik pelaporan pada BUPDA sebagai badan usaha desa adat dengan karakteristik pertanggungjawaban sosial dan budaya yang khas. Masih terdapat kekosongan kajian mengenai bagaimana standar akuntansi dipahami dan dijalankan dalam konteks desa adat.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat (BUPDA) Surya Tani Desa Bonyoh yang dikelola dengan konteks lokal dan

memiliki karakteristik berbeda dibandingkan beberapa BUPDA lainnya di Bali. BUPDA Surya Tani bergerak pada sektor perdagangan sarana produksi pertanian berupa obat pertanian, pupuk, pakan ternak, dan kebutuhan pertanian lainnya yang secara langsung mendukung aktivitas ekonomi masyarakat Desa Bonyoh yang mayoritasnya sebagai petani. Selain menunjukkan perkembangan usaha yang baik ditunjukkan melalui omzet penjualan dari tahun ke tahun, BUPDA Surya Tani juga menghadapi berbagai kendala dalam penyusunan dan pelaporan keuangan sesuai SAK EMKM.

BUPDA Surya Tani dipilih sebagai tempat penelitian bukan semata-mata karena statusnya sebagai BUPDA melainkan karena adanya kombinasi fenomena empiris yang menarik dan relevan dengan fokus penelitian ini, yaitu volume usaha yang besar, belum dilakukannya stok fisik dan data persediaan yang sistematis, laporan keuangan yang telah dipublikasikan sebagai bentuk transparansi, adanya indikasi ketidaksesuaian dengan standar akuntansi, serta sistem tata kelola berbasis nilai-nilai kearifan lokal desa adat. Kombinasi factor tersebut menjadikan BUPDA Surya Tani sebagai objek yang strategis untuk dianalisis, khususnya dalam melihat bagaimana standar akuntansi modern berinteraksi dengan konteks kelembagaan lokal.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada objek yang diteliti yaitu penyusunan laporan keuangan. Sedangkan kebaruan penelitian ini adalah fokus penelitian yang secara khusus menyoroti Bhaga Usaha Padruwen Desa Adat yang sering kali kurang mendapat perhatian dalam literatur akuntansi. Selain itu penelitian ini memberikan perspektif baru tentang bagaimana laporan keuangan disusun dan dikelola dalam konteks lokal. Penelitian ini juga memberikan

wawasan terkait tantangan dan strategi yang dihadapi oleh usaha kecil di lingkungan adat. Serta penelitian ini memberikan rekomendasi praktis yang spesifik untuk BUPDA dan lembaga serupa, yang dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti tertarik melakukan penelitian secara mendalam terkait penyusunan laporan keuangan yang disusun dan dikelola dalam konteks lokal, menganalisis kesesuaian laporan keuangan dengan SAK EMKM dan merekonstruksi laporan keuangan agar sesuai dengan SAK EMKM pada BUPDA Surya Tani Desa Bonyoh dengan judul **“Analisis Kesesuaian Penyusunan dan Pelaporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM Pada BUPDA Surya Tani Desa Adat Bonyoh”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun masalah yang dapat diidentifikasi yang terjadi pada BUPDA Surya Tani Desa Bonyoh sebagai berikut:

1. Pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual sehingga kurang efisien.
2. Penyusunan laporan keuangan yang dilakukan BUPDA Surya Tani Desa Bonyoh masih sangat sederhana belum sesuai Standar Akuntansi Keuangan.
3. Ketidakakuratan posisi keuangan yang dilaporkan mencerminkan kondisi keuangan yang tidak sebenarnya sehingga adanya ketidakpastian dan lemahnya transparansi.
4. Kurangnya pemahaman pengurus dan karyawan BUPDA Surya Tani terkait penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan.

5. Adanya perangkatan tugas karyawan yang menyebabkan pekerjaan tidak efektif.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan terkait permasalahan diatas maka untuk mendapatkan hasil penelitian yang terfokus dan menghindari suatu penafsiran yang tidak diinginkan penelitian dibatasi hanya pada penyusunan laporan keuangan dan penerapan SAK EMKM pada BUPDA Surya Tani Desa Bonyoh dan tantangan yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penyusunan laporan keuangan pada BUPDA Surya Tani Desa Bonyoh?
2. Sejauh mana kesesuaian penyusunan laporan keuangan pada BUPDA Surya Tani Desa Bonyoh dengan SAK EMKM?
3. Bagaimana rekonstruksi laporan keuangan berbasis akrual sesuai SAK EMKM yang seharusnya diterapkan pada BUPDA Surya Tani?
4. Apa saja tantangan yang dihadapi BUPDA Surya Tani dalam penyusunan keuangan sesuai SAK EMKM?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyusunan laporan keuangan pada BUPDA Surya Tani Desa Bonyoh.
2. Untuk menganalisis kesesuaian penyusunan laporan keuangan pada BUPDA Surya Tani, sehingga sesuai dengan SAK EMKM.

3. Untuk melakukan rekonstruksi pelaporan keuangan berbasis akrual sesuai dengan SAK EMKM berdasarkan data keuangan aktual BUPDA Surya Tani.
4. Untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi BUPDA Surya Tani dalam penyusunan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan untuk pihak-pihak sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penerapan *Teori Stakeholder* dalam konteks pengelolaan BUPDA sebagai badan usaha berbasis desa adat. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat informasi ekonomi, tetapi juga berperan sebagai sarana akuntabilitas kepada prajuru desa adat, panureksa, dan Masyarakat desa adat sebagai stakeholder. Sehingga, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas pemahaman *Teori Stakeholder* pada konteks kelembagaan lokal yang berbasis kearifan adat.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan mahasiswa dan mampu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana penulisan ilmiah yang baik dan benar, memberikan pemahaman lebih mendalam terkait proses penyusunan laporan keuangan dalam konteks

lokal, serta hasilnya dapat digunakan sebagai referensi atau acuan bagi penelitian selanjutnya.

b. Bagi *Baga Utsaha Padruwen Desa Adat* Surya Tani

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada BUPDA Surya Tani dalam pengembangan penyusunan laporan keuangan, sebagai salah satu badan usaha yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga nantinya dapat berkembang lebih baik lagi, serta dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.

c. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi kepustakaan bagi para peneliti selanjutnya. Memberikan kontribusi dalam bidang riset ilmiah dan tambahan bukti empiris terkait penyusunan laporan keuangan *Baga Utsaha Padruwen Desa* yang dikemas dalam konteks lokal.

